

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA BATU
(Studi Pada Dinas Kota Batu)**

SKRIPSI



**Oleh :
LASARUS DESIT
NIM. 2016210226**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADENI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Bantuan pangan non tunai (BPNT) ialah Bantuan yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan. Bantuan tersebut diberikan langsung melalui rekening penerima bantuan. Bantuan ini hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pokok kebutuhan rumah tangga di E-warong yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Program bantuan ini di harapkan mampu memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat atau bantuan guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan teknik data sekunder dan primer. Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini yang terdiri dari indikator 1. Pemahaman Program, 2. Tepat sasaran, 3. Tepat waktu, 4. Tercapainya tujuan, dan 5. Perubahan nyata. Faktor pendukung meliputi tim atau pendamping program BPNT dan infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan agen atau E-warong, Bank himbara, dan jaringan internet. Faktor penghambat atau kendala adanya (*double kredit*) agen atau E-warong dinyatakan memiliki hutang atau minus.

Kata Kunci : Efektivitas, Program BPNT, Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan suatu permasalahan di suatu negara khususnya di Indonesia. Kemiskinan di picu suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Penyebabnya di antara lain tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya perhatian dari pemerintah dan lain sebagainya. Dengan demikian hal ini dapat memicu pertumbuhan kemiskinan yang terus meningkat. Dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2018 salah satu kota yang mempunyai permasalahan kemiskinan yaitu Kota Batu dengan indeks kemiskinan 3,89 persen. Jika di bandingkan indeks kemiskinan kota batu tahun 2017 sebesar 4,31 persen. Maka dalam kurun waktu 1 tahun Kota Batu terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,42 poin. Sehingga dalam kurun waktu 1 tahun tersebut Kota Batu mampu meminimalisir indeks kemiskinan tersebut.

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut dikarenakan peran dan tanggung jawab dari pemerintah guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di antaranya di Program BPNT. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok. Program BPNT merupakan program bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM) dengan penyaluran langsung ke rekening penerima bantuan sebesar Rp. 110.000-, setiap bulannya. Nantinya dapat ditukarkan dengan bahan sembako seperti beras, telur, minyak goreng dan lain sebagainya di E-warong yang sudah di tentukan atau yang bekerjasama dengan Bank Himbara.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah program pengganti program Beras Sejahtera (Rasta) yang memiliki permasalahan diantaranya : 1. Rumah tangga yang seharusnya menerima Program Rasta tetapi tidak menerima. 2. Rumah tangga yang tidak berhak menerima program Rasta justru mendapatkan bantuan program Rasta. 3. Keterlambatan pendistribusian bahan pangan. Dari permasalahan tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2017 pemerintah terus berupaya menggantikan program Rasta ke Program BPNT.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Program BPNT ?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Program BPNT ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Efektivitas penerapan program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
Bisa menambah wawasan kepada semua pihak hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas penerapan program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan referensi dan acuan terutama dalam pembuatan regulasi untuk melaksanakan pembuatan program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk tambahan ilmu pengetahuan tentang efektivitas penerapan program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya Bandung: ISBN
- Khosman, Ali. 2015. Indikator Kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin Jakarta: IPB
- Rahardjo, Dawam. 2016. Transformasi Kesejahteraan. Jakarta : LP3ES
- Sinambela, Poltak Lijan. 2016. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Impelentasi.
Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Dwi yanto, Agus. 2012. Manajemen Pelayanan Publik ; Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung : Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2013 Tentang
Pedoman Pelayanan Umum Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Setyawan, Dody. 2016. Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan
dalam Peningkatan Sumber Daya Alam(SDA), Vol. 5, NO. 2 (2016)
- Rachman, Benny. 2018. Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rasta)
dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 16, No. 1
(2018)
- Kharismawati, Ika Surya. 2018. Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-
Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Universitas Negeri
Surabaya. Vol. 16. No.4 (2018)

INTERNET

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2018. Persentase Penduduk Miskin.
(<https://malangkota.bps.go.id/statictable/2018/10/29/628/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2016-2018.html>) diakses pada tanggal 19 september 2019 (ONLINE)